

An Analysis Of The Accounting For Employee Income Supplement (TPP) Budget Responsibility At Disdikbud

Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Di Disdikbud Kabupaten Seluma

Dendi Sanjaya ¹⁾; Neri Susanti ²⁾; Yudi Irawan ³⁾

¹⁾Study Program of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

^{2,3)} Department of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ dendibac59@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [31 Agustus 2024]

Revised [28 Oktober 2024]

Accepted [02 November 2024]

KEYWORDS

Accountability Accounting, TPP Budget .

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Laporan pertanggungjawaban harus dapat menelusuri ketidakefisienan masing-masing komponen, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan suatu keadaan yang dapat menyebabkan sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui untuk menganalisis akuntansi pertanggungjawaban anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di DISDIKBUD Kabupaten Seluma. Pengumpulan data melalui wawancara dan Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Struktur organisasi yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma untuk pelaksanaan anggaran TPP ini dikatakan sudah baik karena adanya pemisahan tanggung jawab, untuk peanggaran TPP dilaksanakan oleh bagian perencanaan anggaran sedangkan untuk pencairan TPP dilaksanakan oleh bagian keuangan. Penyusunan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma dilakukan berdasarkan SK Bupati kabupaten Seluma dan pencairan anggaran dilakukan dengan pengusulan nilai TPP dari masing-masing pegawai kepada bendahara selanjutnya bendahara akan membuat rekapan untuk TPP seluruh pegawai dan selanjutnya akan diperiksa oleh PPK baru diserahkan kepada Kepala Dinas untuk diperiksa dan disetujui jika sudah disetujui TPP dapat dicairkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma belum melakukan pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali dengan cukup memadai, dikarenakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma dan biaya TPP dimasukkan kepada biaya terkendali. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma telah membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran TPP. Pada laporan pertanggungjawaban dapat dilihat berapa besarnya perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, serta selisihnya. Untuk tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 93,62% dan tahun 2023 realiasi anggaran sebesar 89,83%. Sisa anggaran ini terjadi karena adanya pemotongan TPP bagi pegawai yang melakukan pelanggaran seperti datang terlambat, tidak absen dan kinerja tidak memenuhi jam kerja.

ABSTRACT

The accountability report must be able to trace the inefficiencies of each component, so that corrective actions can be taken if a situation is found that may cause the established goals to not be achieved. The purpose of this research is to analyze the accounting for the responsibility of the Additional Income Budget of Employees (TPP) at DISDIKBUD Seluma Regency. Data collection was conducted through interviews, and the analysis method used in this study is descriptive method. The results of the study show that the organizational structure at the Department of Education and Culture of Seluma regency for the implementation of the TPP budget is considered good due to the separation of responsibilities. The TPP budgeting is carried out by the budget planning department, while the disbursement of TPP is executed by the finance department. The budget preparation at the department is based on the Decree of the Regent of Seluma Regency, and the budget disbursement is done by proposing the TPP amount from each employee to the treasurer. The treasurer then compiles a summary for all employees' TPP, which is then reviewed by the PPK before being submitted to the Head of Department for approval. Once approved, the TPP can be disbursed. The Department of Education and Culture of Seluma regency has not adequately separated controllable and uncontrollable costs, as the TPP expenses are included in controllable costs. The department has prepared accountability reports in the form of TPP budget realization reports. In the accountability report, it can be seen the comparison between the budget and its realization, as well as the differences. For the year 2022, the budget realization was 93.62%, and for 2023, it was 89.83%. This budget surplus occurred due to deductions in TPP for employees who committed violations such as arriving late, not clocking in, and performance not meeting working hours.

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah adalah organisasi besar yang dapat dianggap sebagai suatu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban tersebut terbagi menjadi pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga pada level pelayanan atau program misalnya dinas-dinas. Dinas Pemerintah merupakan salah satu contoh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban tersebut biasanya

disebut dengan istilah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). SKPD adalah dasar perencanaan, pengendalian anggaran dan penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan. Dalam konteks pemerintah daerah, peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah agar dikelola secara taat pada peraturan perundang-undangan, tertib, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat (Sulastri, 2020:98).

Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan juga sebagai alat pengendalian. Melalui akuntansi pertanggungjawaban setiap pengguna anggaran di masing-masing bidang melaporkan tanggungjawabnya. Dengan demikian, pimpinan dapat mengontrol dan mengawasi pengeluaran anggaran. Selain itu pengguna anggaran juga harus dilaporkan dan dibandingkan dengan anggaran yang telah di tentukan. Tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mengetahui besarnya dana yang dibutuhkan oleh masing-masing sektor terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana. Proses penganggaran mengacu pada rencana kegiatan kantor setiap kali dilakukan kegiatan dan merangkum semua di bagian keuangan dan pelaporan.

Dalam suatu instansi harus mempertanggungjawabkan semua biaya yang masuk dan keluar serta harus memperhatikan biaya terkendali dan tidak terkendali guna memperlancar proses pelaporan dan pertanggungjawaban setiap unit pertanggungjawaban menyusun rencana program dan anggaran untuk membuat laporan pertanggungjawaban guna mengetahui apakah pengendalian biaya telah berjalan dengan baik dan telah menggunakan biaya secara efisien. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban yang mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat pertanggungjawaban dengan menetapkan pendapatan dan biaya tertentu. Akuntansi pertanggungjawaban timbul sebagai akibat adanya wewenang yang diberikan dan bagaimana mempertanggungjawabkan dalam bentuk suatu laporan tertulis.

Dengan wewenang dan tanggungjawab tersebut akan memudahkan pengendalian terhadap penyimpangan yang terjadi. Akuntansi pertanggungjawaban banyak dipakai oleh setiap dinas atau badan usaha karena memungkinkan untuk merekam seluruh aktivitas usahanya, kemudian mengetahui unit yang bertanggungjawab atas aktivitas tersebut, dan menentukan unit usaha mana yang tidak berjalan secara efisien (Tumbuan, 2019:23) Laporan pertanggungjawaban harus dapat menelusuri ketidakefisienan masing-masing komponen, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan suatu keadaan yang dapat menyebabkan sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam mencapai tujuannya, disusunlah strategi-strategi sebagai petunjuk dalam mencapai tujuannya. Untuk memastikan bahwa setiap dinas melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien, manajemen melakukan suatu proses yang disebut dengan pengendalian. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas yang dilakukan.

Anthony dan Govindarajan (2019:58). Pusat-pusat pertanggungjawaban terbagi menjadi empat pusat pertanggungjawaban, yaitu: pusat biaya, pusat investasi, pusat laba dan pusat pendapatan. Demikian akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya sangat penting dalam pencapaian prestasi perusahaan dalam mengontrol biaya agar dapat meningkatkan laba sehingga dalam pencapaian pengendalian manajemen yang berhasil, manager pusat pertanggungjawaban harus benar-benar menjalankan fungsinya. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban biaya maka dapat mengetahui berapa besarnya penyimpangan yang terjadi antara realisasi biaya dan anggaran biaya. Informasi penyimpangan tersebut dijadikan oleh pihak akuntansi dan manajemen sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya pada periode berikutnya, sehingga dapat tercapainya penekanan biaya yang efisien dan efektif. Salah satu bentuk pengendaliannya ialah dengan menggunakan penilaian efektivitas dan efisiensi kinerja, karena membantu kepala dinas untuk memusatkan perhatian pada masalah operasional manajemen pada waktu yang lebih awal untuk pengendalian yang lebih efektif. Oleh karena itu, harus disusun tugas pokok untuk tiap-tiap tingkatan bidang melalui pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban, serta laporan anggaran dan realisasinya dari setiap pusat pertanggungjawaban untuk dapat menentukan prestasi kinerja pusat pertanggungjawaban tersebut. Manajemen yang bertanggungjawab atas perencanaan, pencapaian sasaran pelaksanaan, dan hasil pelaporan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya melalui akuntansi pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, manajemen harus memperhatikan kinerja pusat pertanggungjawaban agar dapat berjalan dengan efektif. Akuntansi pertanggungjawaban yang dilakukan manajemen bertujuan untuk memeriksa keefektifan penyelesaian rencana dan untuk mendeteksi penyimpangan yang mungkin terjadi. Dengan diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban yang baik dan memadai akan membantu perusahaan dalam melaksanakan operasi perusahaan dengan efisien dan efektif, sehingga tujuan perusahaan yang optimum dapat tercapai. Akuntansi pertanggungjawaban juga sebagai sarana untuk mengevaluasi kemampuan setiap manajer, sehingga akan dibentuk landasan terciptanya suatu sistem



pengukuran prestasi kerja. Jika akuntansi pertanggungjawaban diterapkan secara baik dan memadai, perusahaan dapat melihat seberapa besar perubahan yang telah dicapai setiap manajer. Apabila setiap manajer di perusahaan dapat mencapai jumlah sasaran atau target yang telah direncanakan sebelumnya, maka perusahaan dapat memberikan suatu penghargaan.

Penghargaan tersebut nantinya akan memotivasi manajer untuk terus meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018, tambahan penghasilan pegawai adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Gaji merupakan unsur terbesar yang memerlukan ketelitian dalam penempatan, penggolongan, pencatatan serta pembayarannya. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki khususnya oleh sektor publik yaitu dengan pengembangan sistem penggajian. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Desdikbud) Kabupaten Seluma adalah organisasi yang membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dinas ini memiliki program kerja dengan sistem manajemen yang baik dalam menyusun akuntansi pertanggungjawaban sebagai pelaporan atas program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu, pada dinas ini memiliki Kasubid yang dapat memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Fenomena yang terjadi terkait dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban adalah adanya penerapan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang baik dan benar. Hal ini terlihat dari pembuatan Rencana Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang terkesan menaikkan harga, dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap, maka untuk mempertanggungjawabkannya sulit. Kesulitan juga dialami oleh pimpinan seperti dalam hal pengawasan dan pengendalian anggaran-anggaran atau biaya yang terjadi. Kesulitan dalam hal pengawasan dan pengendalian anggaran timbul karena pimpinan tidak dapat secara langsung mengikuti jalannya operasional tersebut secara keseluruhan.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Pertanggungjawaban

Menurut Halim (2020:5) Akuntansi adalah Sistem pengukuran yang berfungsi sebagai penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang satu-satuan ekonomi yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomis dalam menetapkan pilihan-pilihan yang logis diantara berbagai tindakan alternatif. Menurut Mulyadi (2020:98) Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi digunakan untuk mencatat, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Samryn (2019: 258) Akuntansi pertanggungjawaban merupakan adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen.

Pusat Pertanggungjawaban (*Responsibility Center*)

Menurut Anthony dan Govindarajan (2019:98) pusat pertanggungjawaban adalah “Pertanggungjawaban dimana seluruh input diukur dalam bentuk jumlah uang, namun output tidak diukur dengan cara yang sama. prestasi manajer pusat biaya diukur dengan kemampuan untuk menekan biaya-biaya yang digunakan oleh pusat pertanggungjawaban Menurut Anthony dan Govindarajan (2019: 171) menyatakan bahwa pusat pertanggungjawaban merupakan: “Organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas yang dilakukan”. Menurut Hansen dan Mowen (2020: 116) pusat pertanggungjawaban merupakan: “Suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggungjawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu”.

Pusat pertanggungjawaban ialah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipimpinnya. Dalam kaitan ini, suatu organisasi terdiri dari kumpulan dari beberapa pusat pertanggungjawaban. Keseluruhan pusat pertanggungjawaban ini membentuk jenjang hirarki dalam organisasi tersebut. Pada

tingkatan yang terendah bentuk dan pusat pertanggungjawaban ini kita dapatkan sebagai seksi, regulernya bergilir, serta unit-unit kerja lainnya. Pada tingkatan yang lebih tinggi pusat pertanggungjawaban dibentuk dalam departemen-departemen ataupun divisi-divisi.

Pusat pertanggungjawaban pada dasarnya diciptakan untuk mencapai sasaran tertentu, jadi sasaran dari masing-masing individu dalam liar-liar pusat pertanggungjawaban itu harus diusahakan agar selaras, serasi dan seimbang dalam usaha mencapai sasaran umum dari organisasi secara keseluruhan. Suatu pusat pertanggungjawaban membutuhkan masukan yang berupa sejumlah bahan baku, tenaga kerja, ataupun jasa-jasa yang akan di proses dalam pusat pertanggungjawaban, hasil proses tersebut menghasilkan keluaran yang berupa produk atau jasa.

Akuntansi Pertanggungjawaban Pusat Biaya

Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban dimana seluruh input diukur dalam bentuk jumlah uang, namun output tidak diukur dengan cara yang sama. Menurut Anthony dan Govindarajan (2019:64) prestasi manajer pusat biaya diukur dengan kemampuan untuk menekan biaya-biaya yang digunakan oleh pusat pertanggungjawaban. Dalam konsep akuntansi pertanggungjawaban dikenal biaya teknis dan biaya kebijakan (Suadi, 2021:76). Biaya teknis adalah biaya pengeluaran dan manfaatnya dapat ditelusuri karena memiliki hubungan antara masukan dan keluaran yang dihasilkan sedangkan biaya kebijakan adalah biaya yang pengeluaran dan manfaatnya tidak dapat ditelusuri karena pengeluaran dan masukannya yang dihasilkan tidak ada hubungannya.

Biaya kebijakan adalah biaya yang merefleksikan keputusan pihak manajemen yang berkaitan dengan kebijakan tertentu yang biasanya terdapat di unit-unit administrasi dan pendukung (seperti akuntansi, hukum, sumber daya manusia) operasi-operasi litbang, dan aktivitas pemasaran yang outputnya tidak bias diukur dengan uang. Supriyono (2019:87) memberikan definisi sebagai berikut: "Biaya kebijakan adalah biaya yang terjadinya dan variabilitasnya ditentukan berdasarkan kebijakan manajemen dan tidak mempunyai hubungan fisik secara optimal (erat dan nyata) dengan keluarannya." Input biaya kebijakan sulit dikaitkan secara fisik kepada *outputnya* karena *output* tersebut tidak dapat dinilai secara kuantitatif. Biaya kebijakan merupakan hasil dari keputusan manajemen

Sistem Penyusunan Anggaran Pusat Biaya

Menurut Supriyono (2019:90) anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Anthony dan Govindarajan (2019:100) anggaran merupakan "Alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran dapat dibuat untuk setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan.

Hubungan Anggaran dengan Akuntansi Pertanggungjawaban

Ide pokok akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa setiap manajer pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab terhadap elemen-elemen yang secara langsung berada di bawah pengendaliannya. Akuntansi pertanggungjawaban adalah akuntansi yang didesain secara khusus dan diimplementasikan untuk menilai kinerja manajer pusat-pusat pertanggungjawaban. Tanggungjawab manajer adalah pendapatan, biaya laba dan investasi sesuai dengan jenjang manajemen pusat pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN

Untuk pembahasan dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Pengertian metode deskriptif menurut Nazir (2019:54) adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Hansen dan Mowen (2020:76).

Analisis Rasio Realisasi

Dalam penelitian ini anggaran digunakan sebagai informasi akuntansi pertanggungjawaban. Dengan menganalisis anggaran tersebut, dapat diketahui analisis pengendalian biaya yang telah dilakukan perusahaan. Realisasi biaya yang terjadi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya di mana hasil analisis tersebut disajikan berupa persentase perbandingan.

Dari analisis ini kemudian dapat ditetapkan besarnya penyimpangan yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban kepada kepala bagian pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan.

Rumus yang digunakan untuk mengukur efisiensi biaya adalah sebagai berikut: Rasio realisasi biaya terhadap anggaran (Mahmudi, 2020:66):

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{anggaran biaya}} \times 100 \%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma telah membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran TPP. Adapun laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma sebagai berikut :

Tabel 2 Realisasi Anggaran TPP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma Tahun 2022-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase
2022	80.750.000	75.600.000	5.150.000	93.62
2023	90.500.000	81.300.000	9.200.000	89.83

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya laporan pertanggung jawaban yang harus dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma untuk semua anggaran yang telah digunakan setiap tahunnya. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran harus dibuat pelaporannya setiap tahun. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma pelaporan pertanggungjawaban anggaran dibuat oleh bagian bendahara dan selanjutnya akan diperiksa oleh dan diperiksa oleh PPK selanjutnya akan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Dalam penggunaan anggaran tentunya anggaran yang telah disetujui untuk satu anggaran akan dicairkan ke kuasa pengguna anggaran. Namun untuk satu tahun anggaran, anggaran yang sudah disetujui yang biasa disebut dengan istilah pagu anggaran terkadang bisa berlebih dan juga terkadang bisa kurang. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dapat dilihat realisasi anggaran dari TPP masih belum terserap 100% karena masih adanya sisa anggaran pada tahun 2022 dan tahun 2023. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 jumlah sisa anggaran TPP masih tersisa sebesar Rp. 5.150.000,- dengan tingkat realisasi sebesar 93,62% begitu juga dengan tahun 2023 nilai sisa anggaran TPP sebesar Rp. 9.200.000 dengan tingkat realisasi sebesar 89,83%.

Kekurangan realisasi anggaran TPP ini disebabkan karena adanya potongan TPP untuk setiap pegawai seperti potongan TPP keterlambatan, absen tidak masuk kerja dan juga pemotongan karena pelanggaran disiplin kerja. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma menurut struktur organisasinya sudah menggambarkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan posisi yang jelas karena dalam struktur organisasinya memperlihatkan jenjang wewenang dan kedudukan dari atasan hingga bawahan. Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma terdiri dari kepala dinas sebagai pimpinan tertinggi yang dibantu oleh sekretaris dan kepala jabatan fungsional. Kemudian jenjang dibawahnya terdiri dari kepala-kepala bidang yang membawahi beberapa subbidang yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu tipe informasi akuntansi manajemen.

Akuntansi pertanggung jawaban memfokuskan terhadap pembagian wewenang kepada kepala kantor yang bertanggungjawab. Akuntansi pertanggungjawaban berperan sebagai alat pengendalian biaya dengan menghubungkan biaya dengan bagian dimana biaya tersebut dikeluarkan atau diperoleh oleh manajer yang bertanggungjawab pada bagian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian terhadap analisis akuntansi pertanggungjawaban anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di DISDIKBUD Kabupaten Seluma maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Perbandingan Antara Akuntansi pertanggungjawaban anggaran teori Hansen dan Mowen (2020:76) dengan Disdikbud Kabupaten Seluma

Unsur Pengendalian	Hansen dan Mowen (2020:76)	Disdikbud Kabupaten Seluma	Sesuai/Tidak Sesuai
Struktur Organisasi	Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan tanggung jawab tiap tingkatan manajemen	Struktur organisasi telah memiliki tanggung jawab dan wewenang, untuk anggaran TPP dilakukan oleh bagian perencanaan dan pencairan dilaksanakan oleh bagian keuangan.	Sesuai
Anggaran	Anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen	Untuk penyusunan anggaran TPP dilakukan berdasarkan SK dari Bupati Kabupaten Seluma	Sesuai
Biaya terkendali dan tak terkendali	Penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya (<i>controllability</i>) biaya oleh manajemen tertentu dalam operasi	Tidak adanya pemisahan antara biaya terkendali dan tidak terkendali	Tidak Sesuai
Laporan pertanggungjawaban	Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab (<i>responsibility reporting</i>)	Adanya pembuatan laporan anggaran dan realisasi anggaran TPP	Sesuai

Sumber : Hasil Penelitian dan Diolah, 2024

Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara maka dapat dikatakan bahwa struktur organisasi DISDIKBUD Kabupaten Seluma secara jelas telah menggambarkan pendelegasian wewenang, tanggung jawab, pemberian tugas dan kewajiban setiap tingkatan manajemen dengan baik. Kantor juga telah merumuskan dengan jelas fungsi-fungsi pokok, tugas dan tanggungjawab unit kerja. Struktur organisasi dan pendelegasian wewenang struktur organisasi DISDIKBUD Kabupaten Seluma secara jelas telah menggambarkan wewenang dan tugas tiap tingkatan manajemen dengan baik. Pelaksanaan organisasi telah dilaksanakan dengan baik karena adanya pemisahan tugas, bagian penganggaran dilakukan oleh bagian perencanaan sedangkan untuk pencairan dilaksanakan oleh bagian keuangan. Organisasi dapat mewujudkan tujuan instan dengan cara pengorganisasian sumber daya manusia didalam pemanfaatan sumber daya lain melalui struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi memungkingkan keberhasilan perencanaan dan pengendalian yang ditetapkan perusahaan. Hasil penelitian sesuai dengan teori Siswanto (2020:85) struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja.

Anggaran

Berdasarkan penelitian pada DISDIKBUD Kabupaten Seluma diperoleh beberapa data organisasi telah memiliki anggaran sebagai tolak ukur pelaksanaan anggaran kegiatan pusat pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran pada DISDIKBUD Kabupaten Seluma Pengajuan anggaran untuk TPP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma dilakukan dengan prosedur perencanaan yang akan dilakukan oleh Kasubag perencanaan, sekretaris dan kepala Dinas. Namun dalam penetapan besarnya anggaran yang akan ditetapkan untuk TPP ini disusun berdasarkan SK Bupati Seluma tentang jumlah TPP pegawai dan untuk pencairannya dilaksanakan oleh bagian keuangan dengan prosedur pengajuan nilai TPP yang akan diajukan oleh masing-masing pegawai yang bersangkutan kepada bendahara. Selanjutnya pengajuan dari masing-masing pegawai ini akan diuatkan rekapitulasinya oleh bendahara dan diperiksa oleh PKK setelah itu diserahkan kepada Kepala Dinas untuk diperiksa dan disetujui jika sudah disetujui maka TPP dapat dicairkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Suharsimi (2020:1), "Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang.

Pemisahan Biaya Terkendali Dan Tidak Terkendali

Biaya terkendali dikemukakan oleh Mulyadi (2019: 382) yang menyatakan bahwa biaya terkendali adalah biaya yang didapat secara langsung oleh seseorang manajer dalam jangka waktu tertentu. Pada



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma tidak melakukan pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Pemisahan antara biaya-biaya terkendali dan tidak terkendali sangat penting untuk mengetahui penyimpangan suatu anggaran dan agar manajemen mengetahui dimana biaya terjadi dan siapa yang harus bertanggungjawab atas realisasi dan penyimpangan pada anggaran biaya. Dalam penelitian ini didapati bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma tidak melakukan pemisahan biaya-biaya terkendali dan tidak terkendali pada anggaran.

Laporan Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil laporan pertanggungjawaban yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, dapat dikatakan bahwa anggaran biaya TPP yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kelebihan anggaran atau adanya sisa anggaran karena tidak terserap 100%, kekurangan realisasi anggaran ini disebabkan karena adanya potongan penerimaan TPP pada masing-masing pegawai. Dari keterangan diatas juga, dapat dikatakan bahwa laporan pertanggungjawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma telah cukup memadai. Pada kenyataannya kecil kemungkinan biaya yang sesungguhnya terjadi sama dengan biaya yang telah dianggarkan karena adanya situasi dan kondisi yang berubah-ubah dan terdapat beberapa kemungkinan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Namun pada dasarnya kinerja dari pemerintah dapat dikatakan baik, dikarenakan adanya penghematan anggaran. Secara umum terjadinya varians karena adanya selisih yang cukup signifikan antara perencanaan anggaran TPP dan realisasi anggaran TPP pada tahun 2022 dan 2023. Jika dilihat dari selisih yang cukup signifikan, sangatlah mungkin terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga perkiraan dalam belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut terjadi karena adanya pemotongan TPP karena pegawai melakukan pelanggaran dan disanksi dengan pengurangan TPP.

Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian dalam suatu kantor memerlukan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Setiap pusat pertanggungjawaban selalu menetapkan target-target operasional dan anggaran. Dengan membandingkan realisasi dan anggaran, seorang manajer pusat pertanggungjawaban dapat mengetahui apakah pengendalian biaya telah berjalan baik dan telah menggunakan biaya secara efisien. Melalui akuntansi pertanggungjawaban, biaya dikelompokkan dan dilaporkan untuk tiap tingkatan manajemen yang hanya dibebani dengan biaya-biaya yang berada dibawah pengendaliannya atau yang berada dibawah tanggung jawabnya. Dengan demikian, kepala kantor dapat melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengeluaran biaya. Selain itu, biaya juga harus dilaporkan dan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis akuntansi pertanggungjawaban anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di DISDIKBUD Kabupaten Seluma, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma untuk pelaksanaan anggaran TPP ini dikatakan sudah baik karena adanya pemisahan tanggung jawab, untuk peanggaran TPP dilaksanakan oleh bagian perencanaan anggaran sedangkan untuk pencairan TPP dilaksanakan oleh bagian keuangan.
2. Penyusunan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma dilakukan berdasarkan SK Bupati kabupaten Seluma dan pencairan anggaran dilakukan dengan pengusulan nilai TPP dari masing-masing pegawai kepada bendahara selanjutnya bendahara akan membuat rekapitulasi untuk TPP seluruh pegawai dan selanjutnya akan diperiksa oleh PPK baru diserahkan kepada Kepala Dinas untuk diperiksa dan disetujui jika sudah disetujui TPP dapat dicairkan.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma belum melakukan pemisahan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali dengan cukup memadai, dikarenakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma dan biaya TPP dimasukkan kepada biaya terkendali.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma telah membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran TPP. Pada laporan pertanggungjawaban dapat dilihat berapa besarnya perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, serta selisihnya. Untuk tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 93,62% dan tahun 2023 realisasi anggaran sebesar 89,83%. Sisa anggaran ini terjadi karena adanya pemotongan TPP bagi pegawai yang melakukan pelanggaran seperti datang terlambat, tidak absen, dan kinerja tidak memenuhi jam kerja.
5. Laporan pertanggungjawaban anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di DISDIKBUD Kabupaten Seluma telah sesuai dengan teori Hansen dan Mowen (2020:76) yaitu karena telah dilakukan berdasarkan empat unsur yaitu struktur organisasi, anggaran, biaya terkendali dan tak

terkendali, laporan pertanggungjawaban untuk laporan anggaran TPP pada tahun 2022 dan 2023.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah :
Disarankan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma untuk melakukan pemisahan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali agar memudahkan dalam penyusunan anggaran.
Disarankan kepada pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma untuk tidak melakukan pelanggaran agar bisa mencairkan TPP 100%.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Sulisti dan Ferina, Zahra Indah. 2020. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 Tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Apbdes Di Desa Lubuk Mindai Bengkulu Utara*. Jurnal Akuntansi Unihaz
- Anthony, Robert. N dan Govindarajan Vijay. 2019. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Damayanti, Eva. 2019. *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Melalui Pusat Biaya Sebagai Alat*
- Hidayat, Taufik dan Tin, Se. 2020. *Analisis Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajer Pusat Laba di Warung Paskal Bandung*. Jurnal Akuntansi Vol.4 No.2 (November) 187-199
- Ikhsan dan Ishak , 2020. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara
- Mulyadi. 2020. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nurbaeti, 2019, *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2019*, Economics Development Analysis Journal, Vol.2 No.3, Agustus, hal 85-98.
- Nurlaila. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia I*. Ternate: LepKhair.
- Samryn, L.M. 2019. *Akuntansi Manajemen (Informasi Biaya untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi dan Investasi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suadi, 2021. *Akuntansi Biaya*. Jakarta Selatan : Salemba Empat
- Sugiono. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, R.A. 2019. *Akuntansi Biaya : Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan*. Edisi Kedua. Buku Kedua. BPFE: Yogyakarta
- Tambariki, P., Sumual, F., & Sumampouw, O. (2022). *Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa*. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(6), 3233-3246.
- Torina, E. G., Susanti, N., Hidayah, N. R. (2022). *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Pengendalian Biaya Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu*. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 10(S1).
- Viyanti. 2019. *Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Terhadap Penilaian Prestasi Kerja*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 1No. 3.